

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Rahmat-Nya sehingga penyusunan buku ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga nantinya buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi tentang Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen perencanaan terhadap program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan ke depan. Perencanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan analisa dan evaluasi merupakan dokumen yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya. DPMPTSP Kabupaten Kediri merupakan salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Kediri yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Demikian dapatnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 DPMPTSP Kabupaten Kediri ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik. Guna kesempurnaan laporan ini, diharapkan adanya masukan dan koreksi positif.

Kediri, - - - 2024
KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

JOKO SUWONO
NIP. 19760103 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.1.2 Susunan Organisasi.....	2
1.1.3 Visi dan Misi	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	11
2.1 Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	17
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	24
3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD	24
3.1.1 Tujuan.....	24
3.1.2 Sasaran	25
3.2 Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024.....	25
BAB IV : PENUTUP	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang mengamatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah. Sehubungan hal tersebut sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya dan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan kerja sebagaimana telah disusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Dalam prosesnya rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Rancangan Renja SKPD tersebut kemudian akan dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan awal RKPD.



1.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

☐ Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

☐ Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP Kabupaten Kediri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

1.1.2. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai berikut:

**BAGAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**





SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG DIMILIKI

Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Kediri per 31 Desember 2023 sebanyak 27 orang, berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Golongan, terdiri dari:
 - ❖ Pegawai Golongan IV : 8 Orang
 - ❖ Pegawai Golongan III : 11 Orang
 - ❖ Pegawai Golongan II : 1 Orang
 - ❖ Pegawai Golongan I : - Orang
 - ❖ Non PNS / Honorer: 7 Orang
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari:
 - ❖ Pendidikan S-2 : 6 orang
 - ❖ Pendidikan S-1 : 18 orang
 - ❖ Pendidikan SMA/ SMK : 3 orang
 - ❖ Pendidikan SMP : - orang
 - ❖ Pendidikan SD : - orang

1.1.3. VISI DAN MISI

❑ VISI

Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh ke depan. Visi organisasi yang ditetapkan menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan sebagai motivasi pencapaian tujuan masa depan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 dengan menetapkan arah kebijakan utama untuk mencapai sasaran yaitu **“Kabupaten Kediri yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS)”**.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, dinyatakan bahwa Visi Kabupaten Kediri adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani.”**



□ **MISI**

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri mengemban Misi Pembangunan yang ketiga sebagai berikut:

“Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah”

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2024

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043;
30. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024.



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri disusun untuk memperbaiki hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja diharapkan program dan kegiatan dapat terlaksana lebih maksimal dan baik serta sesuai dengan prioritas program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, permasalahan yang dihadapi dibidang penanaman modal dan berdasarkan harapan masyarakat.

❑ **MAKSUD**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPSTSP Kabupaten Kediri pada tahun 2024, adalah :

Sebagai upaya perbaikan program dan kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD yang didasarkan hasil evaluasi selama Triwulan II, sesuai dengan rencana program prioritas.

❑ **TUJUAN**

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini adalah :

- Untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dalam tahun 2024 maupun sebagai pengendalian untuk pelaksanaan tahun berjalan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perubahan Rencana Kerja SKPD disusun diharapkan sesuai dengan kriteria di bawah ini :

- a. mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya;



- d. untuk menyelaraskan dengan kondisi dan kebutuhan terhadap prioritas program dan kegiatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2024, berdasarkan pada sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024**

- 2.1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
- 3.2. Program dan Kegiatan Perubahan Renja Tahun 2024

BAB IV : PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Analisis Terhadap Program – Kegiatan

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan administrasi perkantoran berkaitan dengan tugas-tugas rutin kesekretariatan, sehingga proses kegiatan administrasi perkantoran dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Dari segi anggaran dan penggunaannya/ realisasinya, maka pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan II untuk program ini dapat terealisasi sebesar 36,51% atau terserap sebesar Rp. 1.844.781.451,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dari total anggaran Program yang dialokasikan sebesar Rp 5.052.891.979,00 (lima milyar lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan Rupiah). Dalam hal ini pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai triwulan II tahun anggaran 2024 dapat terselenggara dengan baik. Adapun penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan finalisasi pelaporan kinerja dan keuangan tahun 2023 dengan tepat waktu;
2. Pengeluaran dana yang berkaitan dengan gaji dan tunjangan pegawai, penerimaan honorarium pegawai yang menjadi haknya telah diterima sesuai dengan Pedum yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab.
3. Penyediaan belanja rutin pengadaan barang dan jasa rumah tangga kantor, pemeliharaan kendaraan maupun peralatan/perlengkapan kantor sebagai sarana utama pelaksanaan tugas rutin.
4. Biaya rapat-rapat koordinasi baik di dalam daerah maupun ke luar daerah, meliputi biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi sesuai ketentuan yang tertera di dalam pedoman umum penganggaran.



II. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada tahun 2024, program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, kegiatan tersebut didasarkan dana yang ada terealisasi sebesar Rp 105.775.000 dari alokasi dana Rp 355.000.000 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 29,80 %. Adapun kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,

Maksud adanya kegiatan ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan minat investor dalam melakukan penanaman modal di daerah. Pada tahun 2024, upaya meningkatkan investasi dan kemudahan usaha dilakukan dengan penyusunan raperda Penanaman Modal. Pada Triwulan II, progres kegiatan penyusunan raperda diantaranya:

- Administrasi Rutin;
- Pembahasan dan Revisi Draf Perda Penanaman Modal.

2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Pengembangan Data Potensi Daerah dimaksudkan untuk menyajikan data pengembangan dan peluang investasi daerah yang dapat ditawarkan kepada investor. Pada tahun 2024 kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan triwulan II yaitu:

- Administrasi Rutin;
- Kajian Kajian Trend Investasi.

III. Program Promosi Penanaman Modal

Pada tahun 2024, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II dana yang ada terealisasi sebesar Rp 49.197.300 dari alokasi dana Rp 431.391.600 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 11,40%. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Promosi Penanaman Modal pada DPMPSTSP Kabupaten Kediri dilakukan dengan cara promosi melalui pameran dan promosi langsung ke investor. Pada triwulan II ini, kegiatan yang telah dilakukan diantaranya:

- Administrasi Rutin;
- Pameran investasi APKASI sebanyak 1 kali di Jakarta.



IV. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada tahun 2024, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II dana yang ada terealisasi sebesar Rp 222.407.152 dari alokasi dana Rp 833.271.900 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 26,69 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota. Pelayanan perizinan dilakukan secara online melalui oss.go.id dan penggunaan aplikasi SIMPATIK. Selain pelayanan pada kantor DPMPSTSP Kabupaten Kediri, untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat DPMPSTSP melakukan pelayanan keliling Joss secara terjadwal ke desa-desa di Kabupaten Kediri.

V. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada tahun 2024, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II dana yang ada terealisasi sebesar Rp 95.993.837 dari alokasi dana Rp 669.598.300 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 14,34 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun maksud dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal serta meningkatkan investasi di daerah. Pada triwulan II ini, kegiatan yang telah dilakukan diantaranya:

- Jumlah perusahaan yang dibina : 50 perusahaan;
- Jumlah perusahaan yang diawasi : 30 perusahaan.

VI. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada tahun 2024, program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan, sampai dengan triwulan II dana yang ada terealisasi sebesar Rp 54.701.100 dari alokasi dana Rp 193.108.400 dengan capaian persentase kinerja anggaran sebesar 28,33 %. Adapun kegiatan dimaksud yaitu Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Adapun bentuk keluaran yang terealisasi yaitu:

- Publikasi Kegiatan dinas melalui media cetak, online dan TV;
- Pembuatan Website DPMPSTSP.



2.2.2. Analisis terhadap Indikator Kinerja Utama

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2024, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utamai (IKU) sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah, dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :

- a. Nilai realisasi investasi di daerah, Indikator ini menunjukkan nilai pertumbuhan investasi di Kabupaten Kediri, yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut:
Perkembangan realisasi investasi tahun n. Pada Tahun 2024, menindaklanjuti hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/367/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, merekomendasikan mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja dengan cara memastikan penetapan target kinerja tahun berikutnya lebih baik nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga perencanaan kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja. Sehingga target pada tahun 2024 dievaluasi dari nilai Rp. 787.584.012.300 menjadi Rp. 1.026.672.108.530. Dari hasil evaluasi Triwulan II realisasi investasi sementara sebesar Rp. 475.930.542.111. Target yang direncanakan pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.026.672.108.530. Sehingga prosentase capaian kinerja realisasi investasi 46,36%. Jenis realisasi investasi dari peringkat tertinggi Triwulan I- II disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Nilai Investasi sd Triwulan II Kabupaten Kediri Tahun 2024

NO	SEKTOR USAHA	NILAI INVESTASI (Juta Rp)
SEKTOR PRIMER		
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	39.320
2	Kehutanan	280
3	Perikanan	5.708
4	Pertambangan	460
SEKTOR SEKUNDER		
5	Industri Makanan	121.022
6	Industri Tekstil	2.152
7	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	155
8	Industri Kayu	1.113
9	Industri Kertas dan Percetakan	19.580
10	Industri Kimia Dan Farmasi	9.064



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2024

11	Industri Karet dan Plastik	2.103
12	Industri Mineral Non Logam	1.099
13	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	3.836
14	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam	1.306
15	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	550
16	Industri Lainnya	1.282
SEKTOR TERSIER		
17	Listrik, Gas dan Air	604
18	Konstruksi	11.722
19	Perdagangan dan Reparasi	105.571
20	Hotel dan Restoran	19.077
21	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	9.448
22	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	66.400
23	Jasa Lainnya	54.080
JUMLAH		475.931*

* = Data Sementara

- b. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan. Indeks ini diperoleh melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk Survey Kepuasan masyarakat (SKM). Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan pada nilai indeks kepuasan masyarakat hasil survey. Pada semester I tahun 2024, diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,70 dengan nilai mutu B dan kinerja pelayanan berada pada kategori “Baik”.
- c. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong. Pada realisasi triwulan II kemitraan usaha yang bisa didorong adalah 0 MoU. Realisasi ditargetkan terpenuhi pada akhir tahun anggaran.

Secara sederhana (dalam bentuk matriks), pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri disajikan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DPMPSTP
KABUPATEN KEDIRI

NO.	Indikator Kinerja	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024 sd TW II	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	7	8	8	9	10	12	12	13
1	Prosentase pertumbuhan investasi di daerah	-		5,00%	6,00%	7,00%	8,00%	26,16%	3,08%	8,00%	9,00%	Nilai Investasi Tahun 2023 sebesar Rp. 15.454.428.960.288; Nilai Investasi Tahun 2024 sd Triwulan II sebesar Rp. 15.930.359.502.399
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perizinan	-	Ada	79.60	79.65	79.70	79.75	84.25	84.7	79.75	79,80	
3	Nilai realisasi Investasi (Milyar Rupiah)	-	Ada	694.40	736.06	1,026.67	850.59	3,204.08	475.93	850.59	927.14	
4	Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong	-		1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	1 MoU	-	1 MoU	1 MoU	



**2.2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024**

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Berkaitan dengan hal tersebut capaian rencana kerja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, sebagai berikut:

a. **BELANJA GAJI**

Total Belanja gaji sebesar Rp 3.133.496.800,00 (untuk Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan PNS). Nilai realisasi pencapaian : 52.76% atau sebesar Rp. 1.653.323.493,00 rupiah.

b. **BELANJA NON GAJI/ OPERASIONAL**

Total belanja non gaji sebesar : Rp. 4.401.765.379,00 tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan sejumlah 6 (enam) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh bagian Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, Bidang Promosi dan Sistem Informasi dan Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu. Secara terinci hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sampai dengan triwulan II Tahun 2024, disajikan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

**HASIL EVALUASI HASIL RKPd KABUPATEN KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome) Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPd s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Penanggung jawab	Ket						
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13=12.7x100%				14 = 6 + 12		15=14.5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp		
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)																													
Non Urusan																													
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		29,659,733,947		13,218,891,640		7,535,262,179		611,353,308		1,761,502,532		-		-		2,372,855,840		31.49%		0		15,591,747,480		52.57		
2	18	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,136,656,323	100.00%	9,054,910,920	100%	5,052,891,979		574,173,639		1,270,607,812		-		-		1,844,781,451		36.51%			10,899,692,371		43.36			
2	18	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37 Laporan	39,836,900	26 laporan	10,332,000	10 dokumen	923,200	3 dokumen	-	3 dokumen				509,000		6 dokumen	509,000	60.00%	55.13%	26 laporan	10,841,000	70.27	27.21		
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dokumen	11,100,000	6 dokumen	3,542,000	2 dokumen	314,500	0	0					0		dokumen	0	0.00%	0.00%	6 dokumen	3,542,000	46.15	31.91	Sekretariat
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	17,378,325	6 laporan	3,962,000	2 laporan	304,600	1 laporan	1 laporan				262,000		2 laporan	262,000	100.00%	86.01%	8 dokumen	4,224,000	66.67	24.31	Sekretariat	
2	18	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 dokumen	11,358,575	14 dokumen	2,828,000	6 dokumen	304,100	2 dokumen	2 dokumen				247,000		4 dokumen	247,000	66.67%	81.22%	18 dokumen	3,075,000	150.00	27.07	Sekretariat	
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	18 dokumen	24,019,934,161	9 dokumen	8,348,013,818	3 dokumen	3,715,252,715	1 dokumen	567,736,490				1,228,184,013		1 dokumen	1,795,920,503	33.33%	48.34%	9 dokumen	10,143,934,321	50.00	42.23		
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	72 Bulan	21,642,848,946	36 bulan	7,305,505,753	12 bulan	3,133,496,800	3 bulan	551,062,624	3 bulan			1,102,260,869		6 bulan	1,653,323,493	50.00%	52.76%	36 bulan	8,958,829,246	50.00	41.39	Sekretariat	
2	18	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Bulan	2,359,595,340	36 bulan	1,039,540,265	12 bulan	581,605,915	3 bulan	16,673,866	3 bulan			125,788,144		6 bulan	142,462,010	50.00%	24.49%	36 bulan	1,182,002,275	50.00	50.09	Sekretariat	
2	18	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	17,489,875	3 Laporan	2,967,800	1 laporan	150,000	1 laporan	-	0		135,000		1 laporan	135,000	100.00%	90.00%	4 laporan	3,102,800	66.67	17.74	Sekretariat		
2	18	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	12 laporan	42,265,000	6 laporan	15,041,600	2 laporan	287,600	0	1 laporan				-		1 laporan	-	50.00%	0.00%	6 laporan	15,041,600	33.33	35.59		
2	18	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	12 laporan	42,265,000	6 laporan	15,041,600	2 laporan	287,600	0	1 laporan				-		1 laporan	-	50.00%	0.00%	6 laporan	15,041,600	50.00	35.59	Sekretariat	
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	245,821,439	100	161,619,626	100%	1,132,553,835	16.67	855,000	16.67			7,245,500		33.33	8,100,500	33.33%	0.72%	100.00%	169,720,126		69.04		
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	240 komponen	8,995,100	125 komponen	5,897,000	40 komponen	1,497,600	0	0				0		0	-	0.00%	0.00%	125 kompren	5,897,000	52.08	65.56	Sekretariat	
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 peralatan	25,664,639	23 peralatan	54,446,006	106 peralatan	1,093,070,835	0	0				0		0	-	0.00%	0.00%	23 peralatan	54,446,006	460.00	212.14	Sekretariat	
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 peralatan	47,836,700	12 peralatan	20,883,000	4 peralatan	9,315,100	0	0				0		0	-	0.00%	0.00%	12 peralatan	20,883,000	50.00	43.65	Sekretariat	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome) Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Penanggung jawab	Ket
				5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13=12:7x100%		14 = 6 + 12		15=14:5x100%			
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2	18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	24 barang cetakan	63,600,000	12 barang cetakan	30,957,420	4 barang cetakan	7,051,800	0	-	0					0	-	0.00%	0.00%	12 barang cetakan	30,957,420	50.00	48.68	Sekretariat		
2	18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 bahan	60,780,000	12 bahan	29,520,000	4 bahan	10,260,000	1 bahan	855,000	1 bahan	3,420,000				2 bahan	4,275,000	50.00%	41.67%	14 bahan	33,795,000	58.33	55.60	Sekretariat		
2	18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	72 rapat	38,945,000	36 rapat	19,916,200	12 rapat	11,358,500	0	-	4 rapat	3,825,500				4 rapat	3,825,500	33.33%	33.68%	40 rapat	23,741,700	55.56	60.96	Sekretariat		
2	18 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	100%	538,725,100	100%	311,970,526	100%	176,874,629	25%	5,582,149	25%	31,189,904				50%	36,772,053	50.00%	20.79%	100	348,742,579		64.73			
2	18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa Surat Menyurat	72 bulan	15,300,000	36 bulan	8,166,300	12 bulan	3,005,000	3 bulan	500,000	3 bulan	544,000				6 bulan	1,044,000	50.00%	34.74%	42 bulan	9,210,300	58.33	60.20	Sekretariat		
2	18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	72 bulan	335,995,100	36 bulan	168,314,726	12 bulan	106,929,629	3 bulan	5,082,149	3 bulan	24,570,904				6 bulan	29,653,053	50.00%	27.73%	42 bulan	197,967,779	58.33	58.92	Sekretariat		
2	18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 bulan	187,430,000	36 bulan	135,489,500	12 bulan	66,940,000	3 bulan	-	3 bulan	6,075,000				6 bulan	6,075,000	50.00%	9.08%	42 bulan	141,564,500	58.33	75.53	Sekretariat		
2	18 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	32 unit	250,073,723	16 unit	207,933,350	6 unit	27,000,000	0	1 unit	3,479,395				1 unit	3,479,395	20.00%	12.89%	15 unit	211,412,745	43.75	84.54				
2	18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	30 unit	172,175,000	15 unit	108,628,350	5 unit	27,000,000	0	-	1 unit	3,479,395				1 unit	3,479,395	20.00%	12.89%	16 unit	112,107,745	53.33	65.11	Sekretariat		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 gedung	77,898,723	1 gedung	99,305,000	0	-	0							0	-	0.00%	#DIV/0!	1 gedung	99,305,000	50.00	127.48	Sekretariat		
2	18 02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang diberikan insentif/ fasilitas di bidang penanaman modal	150%	644,858,480	25.00%	277,174,000	25%	355,000,000	0	2,384,000	103,391,000				0	105,775,000	0.00%	29.80%		382,949,000		59.38				
2	18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal	9 dokumen	337,416,480	8 dokumen	255,564,101	1 dokumen	116,717,400	0	-	30,260,800				2 dokumen	30,260,800	0.00%	25.93%	8 dokumen	285,824,901	88.89	84.71				
2	18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	3 dokumen	224,348,000	4 dokumen	212,293,975	1 dokumen	116,717,400	0	-	30,260,800				0	30,260,800	0.00%	25.93%	4 dokumen	242,554,775	133.33	108.12	Bidang Bangdal PM			
2	18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	6 dokumen	113,068,480	4 dokumen	43,270,126			0	-						0.00%	#DIV/0!	4 dokumen	43,270,126	66.67	38.27	Bidang Bangdal PM				

No	Kode				Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Pogram (Outcome) Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)		Penanggung jawab	Ket	
													I		II		III		IV												
													K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13=12:7x100%		14 = 6 + 12		15=14:5x100%		16	17	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RUPM Peta potensi dan peluang usaha yang disusun	7 dokumen	307,442,000	4 Dokumen	411,558,331	2 Dokumen	238,282,600	0	2,384,000	1 Dokumen	73,130,200	0	0	0	0	1 Dokumen	75,514,200	50.00%	31.69%	4 Dokumen	487,072,531	28.57	128.20		
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten	2 dokumen	41,117,000	1 Dokumen	85,521,950	1 Dokumen	69,282,600	0	1,724,000	1 Dokumen	58,405,400					1 Dokumen	60,129,400	100.00%	86.79%	2 Dokumen	145,651,350	100.00	354.24		
	2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen peta potensi dan peluang usaha yang disusun.	7 dokumen	266,325,000	3 Dokumen	326,036,381	1 Dokumen	169,000,000	0	660,000	0	14,724,800					0	15,384,800	0.00%	9.10%	3 Dokumen	341,421,181	42.86	128.20	Bidang Bangdal PM	
	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	143,334,187	100%	369,868,850	100%	431,391,600	25%	-	-	49,197,300	-	-	-	-	-	49,197,300	0.00%	11.40%	100	419,066,150		292.37		
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah media promosi market inteligent publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan	9 kegiatan	143,334,187	11 kegiatan	369,868,850	2 kegiatan	431,391,600	-	-	-	49,197,300	-	-	-	-	-	49,197,300	1000.00%	11.40%	11 kegiatan	419,066,150	122.22	292.37		
	2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan promosi ke Pengusaha/Investor yang dilaksanakan	6 kegiatan	143,334,187	11 kegiatan	369,868,850	2 kegiatan	431,391,600	0	-	0	49,197,300					0	49,197,300	0.00%	11.40%	11 kegiatan	419,066,150	183.33	292.37	Bidang Promosi dan Sistem Informasi	
	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	2,529,171,877	100%	1,843,890,872	100%	833,271,900	-	21,224,736	-	201,182,416	-	-	-	-	100.00%	222,407,152	0.00%	26.69%		2,066,298,024		81.70		
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.	Prosentase izin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai	80%	2,529,171,877	77%	1,843,890,872	78%	833,271,900	-	21,224,736	-	201,182,416	-	-	-	-	100.00%	222,407,152	128.21%	26.69%		2,066,298,024		264.97		
	2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jenis izin yang dilayani melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik	40 jenis	574,803,000	61 izin	391,975,985	11 jenis	725,429,900	11 jenis	21,224,736	11 jenis	199,499,416					11 jenis	220,724,152	100.00%	30.43%	61 jenis	612,700,137	152.50	106.59	Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu	
	2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal	Jenis Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal (perizinan berusaha perizinan non berusaha)	45 jenis	1,586,205,277	34 jenis	1,133,618,087	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	#DIV/0!	34 jenis	1,133,618,087	75.56	71.47	Bidang Pelayanan Terpadu	
	2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.	Jenis dokumen terkait layanan perizinan dan pengaduan (Standar Pelayanan dan SKM) yang diterbitkan	7 jenis	368,163,600	4 jenis	318,296,800	1 jenis (2 dokumen)	107,842,000	0	-	0	1,683,000						1,683,000	0.00%	1.56%	4 jenis (8 dokumen)	319,979,800	57.14	86.91	Bidang Pelayanan Perizinan Terpadu	
	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	85%	831,375,843	82%	1,286,069,577	82%	669,598,300	-	13,570,933	-	82,422,904	-	-	-	-	80%	95,993,837	11.40%	14.34%		1,382,063,414		166.24		
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian	918 perusahaan	831,375,843	1536 perush.	1,286,069,577	348 perusahaan	669,598,300	19 perusahaan	13,570,933	61 perusahaan	82,422,904					80 perusahaan	95,993,837	22.99%	14.34%	1524 perush	1,382,063,414	166.01	166.24		
	2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun	335 perusahaan	227,709,708	147 perush.	134,914,714	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0.00%	#DIV/0!	152 perush.	134,914,714	45.37	59.25	Bidang Bangdal PM	
	2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pembinaan	290 perusahaan	443,908,135	1220 perush.	956,596,488	300 perusahaan	428,181,000	0	2,446,933	50 perusahaan	40,087,404					50 perusahaan	42,534,337	16.67%	9.93%	1220 perush	999,130,825	420.69	225.08	Bidang Bangdal PM	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun Lalu 2023	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2024	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2022 (%)	Penanggung jawab	Ket					
							I		II		III		IV								12 = 8+9+10+11	13=12:7x100%	14 = 6 + 12	15=14:5x100%	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 8+9+10+11	13=12:7x100%	14 = 6 + 12	15=14:5x100%	16	17									
	2	18 05 2.01 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pengawasan.	298 perusahaan	159,758,000	149 perush.	194,558,375	48 perusahaan	241,417,300	19 perusahaan	11,124,000	11 perusahaan	42,335,500	30 perusahaan	53,459,500	62.50%	22.14%	152 perush	248,017,875	51.01	155.25	Bidang Bangdal PM		
	2	18 06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	374,337,237	100.00%	386,977,421	100%	193,108,400	25.00%	-	25.00%	54,701,100	-	-	54,701,100	50.00%	28.33%		441,678,521		117.99		
	2	18 06 2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.	Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan	18 Jenis (buku website sosialisasi perizinan)	374,337,237	12 jenis	386,977,421	4Jenis (buku website sosialisasi perizinan publikasi)	193,108,400	-	-	1 jenis	54,701,100	-	-	1 jenis	54,701,100	25.00%	28.33%	12 jenis	441,678,521	66.67	117.99	
	2	18 06 2.01 01	Pengelolaan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.	Jenis penyajian data dan penyampaian informasi perizinan dan non perizinan.	6 buku 6 website 310 peserta	374,337,237	8 jenis	386,977,421	4 jenis	193,108,400	0	-	1 jenis	54,701,100			1 jenis	54,701,100	25.00%	28.33%	12 jenis	441,678,521	66.67	117.99	Bidang Promosi dan Sistem Informasi

Faktor Pendorong Keberhasilan Kerja : Kegiatan tetap berjalan meski pencairan anggaran terkendala

Faktor Penghambat Pencapaian Kerja : Adanya Perubahan Jadwal sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan dan adanya perubahan sistem penatausahaan sehingga kendala pada ganti uang untuk operasional kegiatan

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya : Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan serta menyesuaikan rasionalisasi anggaran, koordinasi dengan BPKAD terkait pencairan GU agar tepat waktu

Tidak Lanjut yang Diperlukan dalam RKPD Tahun Berikutnya : Pelaksanaan Program dan Kegiatan sesuai dengan penyusunan kerangka acuan kerja; perlunya penyesuaian SSH dan SBU sehingga mengurangi silpa kegiatan



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, jenis pelayanan yang diberikan diantaranya:

1. Perizinan Berusaha

a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, melalui:

1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diproses DPMPTSP melalui OSS, yaitu:

- Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);
- Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).

2) Persetujuan Lingkungan diproses oleh OPD terkait, meliputi:

- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
- Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) diproses oleh OPD terkait.

3) Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.

b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, meliputi:

- 1) Risiko Rendah
- 2) Risiko Menengah Rendah
- 3) Risiko Menengah Tinggi
- 4) Risiko Tinggi

c. Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha yaitu:

- 1) Sektor Perikanan
- 2) Sektor Pertanian
- 3) Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 4) Sektor Perindustrian
- 5) Sektor Perdagangan
- 6) Sektor Pekerjaan Umum
- 7) Sektor Perumahan Rakyat
- 8) Sektor Transportasi
- 9) Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan
- 10) Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- 11) Sektor Pariwisata



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2024

- 12) Sektor Pos dan Telekomunikasi
 - 13) Sektor Ketenagakerjaan.
2. Perizinan Non Berusaha, meliputi:
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha;
 - b. Izin Pemasangan Reklame;
 - c. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - d. Izin Instalatur Kabel Rumah;
 - e. Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
 - f. Izin Pengumpulan Barang atau Uang.
 3. Pelayanan Non Perizinan, meliputi:
 - a. Kemudahan Pelayanan;
 - b. Fasilitas Fiskal;
 - c. Informasi Mengenai Penanaman Modal.

Tabel 2.4

Jumlah Izin / Perizinan Non Berusaha yang telah diterbitkan Triwulan II Tahun 2024

2024	JUMLAH*
1. PKKPR Non Berusaha	40
2. Reklame	106
3. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	4
4. Izin Instalatur Kabel Rumah	0
5. Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi	0
6. Izin Pengumpulan Barang atau Uang	0
7. PBG/ SLF	48
JUMLAH	198

* = data sementara



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RENJA SKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap Pemerintah Daerah menyusun rencana pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disebutkan pada Pasal 11 ayat (1) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Pasal 11 ayat (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. Renja Perangkat Daerah.

Mengacu dan memperhatikan peraturan dimaksud, dalam penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan perlu melakukan evaluasi hasil capaian kinerja, analisis maupun *review* terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan sehingga dapat disimpulkan langkah-langkah yang harus diambil untuk penyelenggaraan program kegiatan guna pencapaian tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

3.1.1 TUJUAN

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini adalah:

- 1) Untuk memperbaiki / menyesuaikan dengan kondisi yang ada atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja awal agar pada akhir periode Tahun Anggaran capaian kinerja dapat maksimal, baik dari sisi pelaksanaan fisik maupun keuangan;



- 2) Untuk memudahkan evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan hasil yang diharapkan ;
- 3) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber dana secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- 4) Untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi bagi para pelaksana kegiatan di daerah.

3.1.2 SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini adalah:

- 1) Tersinkronisasinya program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional di bidang penanaman modal dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- 2) Terakomodirnya program dan kegiatan yang menjadi usulan dari masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
- 3) Meningkatnya nilai investasi di daerah dan minat investor dari berbagai daerah untuk berinvestasi di Kabupaten Kediri.

3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

Rincian Program kegiatan dan jumlah kebutuhan dana yang terdiri dari 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan. Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

**REKAPITULASI RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Layanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 2 . 12 Penanaman modal
 Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Sub Unit Organisasi : 2 . 12 . 01 . 01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,270,967,210.00	5,434,238,979.00	949,056,605.00	29.01
	1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>10 laporan</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>10 Laporan</i>	<i>450,000.00</i>	<i>923,200.00</i>	<i>473,200.00</i>	<i>105.16</i>
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	150,000.00	314,500.00	164,500.00	109.67
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 laporan	150,000.00	304,600.00	154,600.00	103.07
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	150,000.00	304,100.00	154,100.00	102.73
	2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>3,101,155,410.00</i>	<i>4,049,738,815.00</i>	<i>948,583,405.00</i>	<i>30.59</i>
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	2,853,687,500.00	3,467,982,900.00	614,295,400.00	21.53
	5 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	247,317,910.00	581,605,915.00	334,288,005.00	135.17

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	150,000.00	150,000.00	0.00	-
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 laporan	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	2 laporan	287,600.00	287,600.00	0.00	-
	7 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) pada SKPD	2 laporan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	287,600.00	287,600.00	0.00	-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	33,309,200.00	1,186,469,135.00	1,153,159,935.00	3,461.99
	8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Disediakan	40 komponen	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1,497,600.00	1,497,600.00	0.00	-
	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 peralatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	9,856,800.00	1,146,986,135.00	1,137,129,335.00	11,536.50
	10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 peralatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	5,519,100.00	9,315,100.00	3,796,000.00	68.78
	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 barang cetakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4,487,700.00	7,051,800.00	2,564,100.00	57.14
	12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 bahan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	4 Dokumen	5,460,000.00	10,260,000.00	4,800,000.00	87.91
	13 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	12 rapat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	6,488,000.00	11,358,500.00	4,870,500.00	75.07
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	100%	Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan	100%	98,765,000.00	169,820,229.00	71,055,229.00	71.94
	14 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa Surat Menyurat	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,005,000.00	3,005,000.00	0.00	-

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	15 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70,040,000.00	99,875,229.00	29,835,229.00	42.60
	16 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	25,720,000.00	66,940,000.00	41,220,000.00	160.26
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</i>	6 unit	<i>Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</i>	5 unit	37,000,000.00	27,000,000.00	(10,000,000.00)	(27.03)
	17 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	5 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	5 unit	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	-
	18 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	10,000,000.00	0.00	(10,000,000.00)	(100.00)
II	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal	25%	Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal	25%	137,269,300.00	360,000,000.00	222,730,700.00	472.86
	7 <i>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal</i>	2 dokumen	<i>Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal</i>	2 dokumen	25,658,900.00	116,717,400.00	91,058,500.00	354.88
	19 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	1 dokumen	25,658,900.00	116,717,400.00	91,058,500.00	354.88
	8 <i>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun</i>	2 dokumen	<i>Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun</i>	2 dokumen	111,610,400.00	243,282,600.00	131,672,200.00	117.97
	20 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	<i>Tersusunnya Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kabupaten</i>	1 dokumen	<i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i>	1 dokumen	10,323,500.00	69,282,600.00	58,959,100.00	

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	21 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen peta potensi dan peluang usaha yang disusun	1 dokumen	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	101,286,900.00	174,000,000.00	72,713,100.00	71.79
III	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan	100%	96,364,188.00	431,391,600.00	759,994,412.00	788.67
	9 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan	2 kegiatan	Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan	2 kegiatan	96,364,188.00	431,391,600.00	335,027,412.00	347.67
	22 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan	2 kegiatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2 dokumen	96,364,188.00	431,391,600.00	335,027,412.00	347.67
IV	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu	100%	341,242,000.00	781,411,000.00	424,967,000.00	124.54
	10 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai	78%	Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai	78%	341,242,000.00	781,411,000.00	440,169,000.00	128.99
	23 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10.000 pelaku usaha	248,602,000.00	673,569,000.00	424,967,000.00	170.94
	24 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan.	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 orang	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1000 orang	92,640,000.00	107,842,000.00	15,202,000.00	16.41
V	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	83%	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	83%	359,757,668.00	669,598,300.00	91,752,000.00	25.50

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian	348 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian	474 Perusahaan	359,757,668.00	669,598,300.00	309,840,632.00	86.12
25	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	14 Kegiatan Usaha.	0.00	91,752,000.00	91,752,000.00	#DIV/0!
26	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	300 pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 pelaku usaha	317,528,000.00	336,429,000.00	18,901,000.00	5.95
27	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	48 kegiatan usaha (14 kegiatan pengawasan, 34 kepatuhan LKPM)	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	60 Kegiatan Usaha	42,229,668.00	241,417,300.00	199,187,632.00	471.68
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 persen	Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100 persen	65,554,434.00	193,108,400.00	127,553,966.00	194.58
12	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan	3 jenis	Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan	4 Jenis (buku, website , sosialisasi perizinan, publikasi)	65,554,434.00	193,108,400.00	127,553,966.00	194.58

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Anggaran (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG	
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	28 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 dokumen (Buku & database perizinan, website & medsos, sosialisasi & publikasi)	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	65,554,434.00	193,108,400.00	127,553,966.00	194.58
						4,271,154,800.00	7,869,748,279.00	3,598,593,479.00	84.25



BAB IV P E N U T U P

Di dalam laporan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Tahun 2024 sampai dengan triwulan II serta Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan perubahan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan triwulan II.

Besaran rancangan pagu indikatif pendanaan atas rencana program dan kegiatan selama Tahun 2024 memang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam kurun waktu pelaksanaan rencana kerja sangat dimungkinkan adanya perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu terdeteksi saat awal perencanaan, baik faktor alam, kebutuhan internal/eksternal, maupun kemampuan pembiayaan atas program dan kegiatan. Bila hal ini terjadi, maka perubahan atas rencana kerja akan sangat dimungkinkan. Pada kondisi seperti ini evaluasi atas rencana program dan kegiatan merupakan hal yang sangat penting dan tetap senantiasa dilakukan dengan tetap mengacu pada proiritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Pelaksanaan atau penerapan atas rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri mengacu pada beberapa kaidah, yaitu:

- a. Dokumen merupakan dasar penetapan penyusunan belanja kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2024 yang menetapkan belanja hingga sampai pada operasional belanja yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan dan Sub Kegiatan;



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2024

- b. Dalam kurun waktu pelaksanaan rencana kerja perlu senantiasa dilakukan evaluasi untuk menjawab perubahan situasi dan kondisi yang tidak mampu terdeteksi pada awal perencanaan. Evaluasi juga sebagai alat ukur ketercapaian (efektifitas) pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Apabila terjadi perubahan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2024, maka kaidah yang diambil adalah memprioritaskan yang lebih proiritas dan mendahulukan yang mendesak untuk didahulukan, dengan tetap mengacu pada proiritas program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2024;
- d. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2024 harus dilaksanakan secara transparan, terukur, efektif-efisien dan akuntabel.

Dengan adanya Perubahan Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/ kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2024

KEPALA DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI



JOKO SUWONO
NIP. 19750103 199311 1 001

BUPATI KEDIRI,

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA